

JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

**UPAYA ANTI-SLAVERY DALAM MENDORONG PEMERINTAH INDIA  
MERATIFIKASI DUA KONVENSI MENGENAI CHILD LABOUR DI  
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATIONS CONVENTIONS**

Oleh Chaerunnisa Atika Ramdany

20150510233

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
chaerunnisa.atika.2015@fisipol.umy.ac.id

**Abstract**

*This study discusses of the Role of the NGO Anti-Slavery International in encouraging the Indian government to ratify two important conventions concerning child labor in the International Labor Organization In analyzing the efforts of these actors, this study uses the theory of Transnational Advocacy Network (TAN). This study has the hypothesis that the actor carried out two stages of effort namely Information Politics, How Anti-Slavery in providing understanding related to the issue of exploitation of child labor to the community, Leverage Politics namely how Anti-Slavery can bring up the issue of exploitation of child labor in India attention and support from actors who have the power and can influence internationally. Both of these are components carried out by advocacy networks to achieve a goal.*

*Keywords: Anti-Slavery, Child Labour, Transnational Advocacy Network.*

**A. Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh NGO Anti-Slavery Internasional dalam menangani kasus eksploitasi pekerja anak yang terjadi di India pada tahun 2012-2017. Diantara usaha yang dilakukan oleh Anti-Slavery adalah advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah India melalui program-program yang diusung oleh Anti-Slavery mengenai kasus eksploitasi pekerja anak, dengan memiliki tujuan bahwa anak-anak yang dipekerjakan dapat kembali ke bangku sekolah sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk kemudian dapat memajukan bangsa dan negaranya. Dan juga diharapkan program-program yang diusung oleh Anti-Slavery dapat setidaknya menurunkan angka pekerja anak dari tahun ke tahun.

Non Government Organization (NGO) berperan penting sebagai ruang publik dimana sekelompok orang/ organisasi/ komunitas dapat memenuhi kebutuhan pembangunan sosial yang tidak dapat dijawab dan dilakukan oleh negara dan pasar. Contohnya adalah NGO Anti-Slavery, NGO Anti-Slavery adalah NGO Internasional yang berbasis di Inggris, yang dibentuk pada tanggal 17 April 1839 oleh Thomas Clarkson, Thomas Fowell Buxton, dan abolisionist lainnya untuk berkampanye

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

melawan perbudakan di seluruh dunia. Anti-Slavery adalah organisasi Hak Asasi Manusia internasional yang tertua di dunia. (Who we are, 2018) Anti-Slavery secara khusus menangani mengenai isu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah menangani kasus perbudakan dan eksploitasi pekerja anak.

Salah satu NGO di dunia adalah Anti-Slavery, Anti-Slavery adalah organisasi human rights tertua di dunia yang berbasis di Inggris, berdiri pada tahun 1839 oleh alibisionis Inggris bernama Thomas Clarkson. Anti-Slavery sendiri khususnya bekerja dalam bidang perbudakan. Anti-Slavery mengajak setiap orang untuk memberantas atau setidaknya mengurangi segala macam perbudakan di dunia. Dalam memberantas perbudakan, Anti-Slavery dan rekan-rekannya berusaha untuk mencari akar dari permasalahan segala macam perbudakan, termasuk pengucilan dari kekuasaan dan peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan - yang diabadikan oleh diskriminasi sosial dan sistem ketenagakerjaan informal dan genting serta masalah sistemik lainnya, seperti kurangnya lahan reformasi dan tidak memiliki tanah. Anti-Slavery berupaya mengubah struktur dan sistem kekuatan yang melanggengkan siklus perbudakan.

Anti-Slavery Society pertama kali didirikan pada tahun 1823 dan bersama-sama saling berkomitmen untuk menghilangkan perbudakan di Kerajaan Inggris yang akhirnya dicapai pada tahun 1838 dibawah ketentuan Undang-Undang Slavery Abolition Act no. 1833. Pada tanggal 17 April 1839, seorang aktivis yang berasal dari Inggris Joseph Sturge membentuk sebuah organisasi penerus bernama British and Foreign Anti-Slavery Society (yang sekarang dikenal kita sebagai Anti-Slavery), yang bekerja untuk mengilegalkan perbudakan di negara-negara di dunia.

Pada bulan Maret tahun 1839, sebuah surat kabar abolisionis New York menyerukan konvensi untuk menyatukan upaya pasukan Anti-Slavery internasional dari seluruh dunia, lalu pada musim panas 1840, British and Foreign Anti-Slavery Society (BFASS) menjawab panggilan itu, sehingga Pada tanggal 12 Juni hingga 23 Juni 1840, The world Anti-Slavery convention diselenggarakan di London yang bertempat di Freemasons Hall yang kemudian mendapatkan perhatian dari delegasi-delegasi yang ada di seluruh dunia, termasuk delegasi dari Bagian selatan dunia, Amerika Serikat yang mana istilah perbudakan disebut juga sebagai "our peculiar institution". Kebanyakan delegasi-delegasi yang hadir adalah abolisionis terkemuka. Lebih dari 500 alibisionis dari Kanada ke Mauritius menghadiri pertemuan itu, dan ini menarik sekitar 1000 penonton setiap harinya. Dengan Thomas Clarkson sebagai pembicara utama dimana pertemuan tersebut diabadikan sebagai lukisan yang sampai sekarang lukisan tersebut dipajang di The National Portrait Gallery di London. Konvensi ini dipersatukan oleh tujuan yang sama yaitu untuk mengakhiri perbudakan di masa mereka. Para alibisionis Inggris ini bersemangat ingin menghentikan perbudakan manusia dan secara khusus percaya bahwa Inggris pada ambang decade baru dipersiapkan untuk memimpin serangan terhadap perbudakan di seluruh dunia, yang membuat para alibisionis ini yakin adalah karena telah dihapuskannya hukum perbudakan di Hindia Barat Inggris pada tahun 1839. Banyak dari alibisionis ini juga menempuh pendidikan dalam bidang perbudakan, seorang

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

professor dari Universitas Harvard termasuk di antara pembicara utama, dan para hadirin di konvensi mendengar informasi yang mendalam tentang sejarah dan perkembangan bentuk-bentuk perbudakan. Laporan dan informasi ini meneliti berbagai topik yang menarik mulai dari perbudakan di Rusia dan penjajahan Liberia hingga perbudakan di Amerika Serikat dan Hindia Inggris. Beberapa mata kuliah bahkan berisi contoh-contoh awal tentang sejarah perbudakan. Salah satu kontribusi paling berharga yang dibuat oleh konvensi adalah pengumpulan dan publikasi pemeriksaan paling komprehensif tentang perbudakan dan perdagangan budak hingga saat ini. Setelah pertemuan ini, BFASS memantapkan dirinya sebagai clearinghouse internasional untuk informasi dan beasiswa terbaik tentang perbudakan dan perdagangan budak.

Visi dari Anti-Slavery sendiri adalah “a world free from slavery” yang berarti dimana anti-slavery menginginkan dunia ini untuk bebas dari segala macam perbudakan yang ada. Anti-Slavery menangani akar dari segala penyebab perbudakan yang ada, dan konsekuensinya untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Misi dari Anti-Slavery adalah untuk bekerja secara langsung dan tidak langsung dengan para generasi-generasi dan pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga tingkat internasional untuk memberantas perbudakan dan penyebab dari perbudakan yang ada di dunia. (Anti-Slavery, Vision, mission and strategy)

Permasalahan eksploitasi anak sudah mulai menjadi perbincangan orang-orang serta beberapa organisasi yang peduli akan hal ini. Proyek penelitian dan buku-buku yang menganalisa permasalahan pekerja anak ini juga sudah banyak dipublikasikan. Akar permasalahan yang dilihat akan pekerja anak ini yaitu pekerjaan apa saja yang dilakukan anak kecil dan bahaya yang akan dihadapi pekerja anak bahkan hingga mengancam nyawa mereka. Jumlah pekerja anak yang ada di dunia kini lebih tinggi dari yang diperkirakan. Penyebab dari jumlah pekerja anak yang jauh lebih tinggi dari perkiraan pertama karena banyak jenis pekerja anak yang tidak dilaporkan, dan kedua banyak negara yang tidak memiliki keinginan ataupun insentif untuk mempublikasikan berapa pekerja anak yang mereka miliki. Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization berjudul Child Labour yang dirilis pada tahun 2004 menjelaskan statistik bahwa total pekerja anak dibawah umur ada 211 juta anak berusia 5 hingga 14 tahun dan tambahan 141 juta anak berusia 15 hingga 17 tahun yang masih aktif bekerja (Office, 2004).

Istilah “Pekerja Anak” sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang merenggut anak-anak dari masa kecil mereka, dan merenggut potensi dan martabat mereka. Hal ini berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental dari anak-anak yang dipekerjakan tersebut.

Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak harus diklasifikasikan sebagai istilah pekerja anak. Anak-anak yang berpartisipasi dalam pekerjaan yang:

1. Tidak mengganggu kesehatan mereka;
2. Tidak menghambat pertumbuhan mereka;
3. Tidak menghambat aktifitas sekolah mereka;

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

Selama pekerjaan yang dilakukan anak-anak tersebut seperti yang diuraikan diatas maka pekerjaan yang dilakukan anak-anak tersebut masih dalam kategori normal dan positif. Hal ini termasuk dalam:

1. Pekerjaan yang berkontribusi dalam membantu perkembangan anak-anak;
2. Pekerjaan yang bisa meningkatkan pengalaman dan keterampilan mereka sehingga nantinya mereka menjadi anak-anak yang produktif disaat mereka beranjak dewasa.

Di seluruh dunia, jutaan anak-anak dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar. Meskipun dibayar, anak-anak ini terpaksa bekerja dan hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena waktu mereka habis dipakai untuk bekerja. Mereka kehilangan masa kecil mereka dan masa depan mereka.

Meskipun angka pekerja anak di dunia telah menurun lebih dari sepertiga dalam 15 tahun terakhir, isu eksploitasi pekerja anak tetap menjadi tantangan dan penghalang yang serius bagi kesejahteraan anak-anak. Menurut laporan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2017, jumlah pekerja anak di tahun 2000 ada sekitar 246 juta jiwa namun pada tahun 2016 angka pekerja anak menurun menjadi 152 juta jiwa. Meskipun begitu, jutaan anak saat ini sampai sekarang terus dieksploitasi untuk menjadi buruh yang diberi upah sangat murah terutama di negara-negara seperti India. (VILLAGES, n.d.)

Kasus pekerja anak memang telah ada sejak awal abad ke 19 dan awal abad ke-20, banyak anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun yang lahir dari keluarga miskin bekerja di negara-negara barat dan koloni mereka. Anak-anak ini terutama bekerja di sector pertanian, operasi perakitan berbasis rumah, pabrik, pertambangan, dan layanan-layanan seperti news boys (anak-anak yang mengirimkan koran ke rumah-rumah) dan pekerjaan ini beberapa hingga shift malam yang berlangsung selama 12 jam. (Istituto Degli Innocenti and UNICEF , 1996)

Sekitar tujuh puluh tahun yang lalu, India meraih kemerdekaan negaranya. Sejak saat itu, negara ini telah menciptakan salah satu dari negara-negara dengan ekonomi yang di dunia. Namun terlepas dari prestasi kekayaannya, Negara India adalah salah satu negara dengan Pekerja Anak Terbesar di Dunia. Permasalahan pekerja anak di India ini sudah menjadi perbincangan hingga dunia internasional. Baik PBB, UNICEF, hingga beberapa organisasi non pemerintah yang peduli akan hak anak mengeluarkan penelitian serta laporan yang menjelaskan bagaimana eksploitasi pekerja anak di India ini setiap tahunnya sertaantisipasi yang ditawarkan oleh setiap organisasi tersebut.

Dr Yuvraj Dilip Patil dalam tulisannya yang berjudul Poverty and Child Labour in India: Socio-Legal Perspective mengungkapkan bahwa perdagangan anak disebabkan oleh kemiskinan dan minimnya jaminan sosial. Dari 1 miliar lebih penduduk India, sekitar 300 juta hingga 400 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan (Debora, 2017) Anak-anak dalam keluarga miskin sulit mengakses pendidikan sehingga minim keterampilan. Akhirnya, mereka dijual atau dipekerjakan guna memperoleh sejumlah uang.

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

Menurut laporan Child Rights and You (CRY) menjelaskan bahwa mereka mendapatkan data dari sensus nasional India bahwa pekerja anak di India menurut sensus data 2011 sudah mencapai 10,1 juta pekerja anak yang terdiri dari umur 5 hingga 14 tahun (You, 2017). Menurut sensus data 2011 juga menerangkan bahwa ada 22,87 juta pekerja anak yang berumur 15-18 tahun. Bahkan, 1 diantara 11 anak yang ada di India merupakan pekerja dengan rentan umur 5-18 tahun. Sebenarnya ada penurunan yang cukup signifikan akan pekerja anak di India. Penurunan ini sekitar 20% dari sensus sebelumnya yang ada di tahun 2001. Berdasarkan sensus nasional India pada tahun 2001, ada 12,6 juta pekerja anak dengan rentang usia 5 sampai 14 tahun yang dipekerjakan di India. Pada tahun 2011 jumlahnya turun menjadi 4,35 juta pekerja anak. Kemudian 80% pekerja anak yang ada di India berasal dari wilayah pedesaan. Serta data sensus ini memberikan pernyataan bahwa India saat ini berada di urutan 17 dunia sebagai negara penghasil pekerja anak dengan total estimasi 168 juta pekerja anak di dunia (You, 2017).

Kantor The National Sample Survey telah melakukan survey dan menyebutkan jumlah pekerja anak menjadi 4,98 juta (Bureau, 2017). Sedangkan laporan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015 mengungkapkan sekitar 5,7 juta anak di India usia 5-17 tahun jadi pekerja. UNICEF memperkirakan jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu mencapai 28 juta pekerja anak (Indian parliament passes contentious child labour bill, 2016).

Ada beberapa tipe pekerja anak yang ada di India dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Beberapa tipe pekerja anak tersebut terdiri dari:

1. Pekerja anak industri

Sektor industri di India merupakan penyumbang terbesar dengan pekerja anak dibawah 18 tahun. Sekitar 10 juta anak dengan rentan umur 5 sampai 14 tahun bekerja informal atau industri kecil termasuk didalamnya 4,5 juta anak perempuan. Industri kecil tersebut terdiri dari industri pakaian, lahan pembakaran batu bata, pertanian, industri kembang api, industri berlian dan lainnya.

2. Pekerja anak domestik

Pekerja anak domestik ini menyumbang angka 10% dari total pekerja anak yang ada di India. Mereka termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dipekerjakan oleh keluarga yang kaya. Bagi anak-anak, di usia mereka seperti ini tidak memiliki pilihan dengan melayani keluarga yang lebih mampu dari kondisi ekonomi keluarga pekerja anak sendiri. Kemiskinan inilah yang menjadi faktor inti penyebab anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Pada kasus ini orang tua lah yang menjadi jembatan antara anak dengan keluarga yang akan mempekerjakan anak tersebut. Ada sekitar 20% pekerja domestik yang berumur dibawah 14 tahun dan mayoritas merupakan anak perempuan.

3. Pekerja anak paksa

Pekerja anak paksa ini merupakan pekerja yang memang dipaksa guna membantu membayar hutang dari orang tua mereka atau pengasuh mereka. Meskipun jumlah pekerja anak paksa ini sempat menurun karena pengawasan ketat pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya tetapi tetap saja dilakukan secara diam-diam di

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

tempat terpencil dan susah untuk ditemukan. Biasanya anak-anak dari pedesaan yang rentan terkena permasalahan ini. Karena biasanya para petani berhutang besar dengan si peminjam uang dan, si peminjam biasanya membuat perjanjian yang melibatkan saudara ataupun anak dari si petani untuk bekerja secara paksa untuk si peminjam. Namun, saat ini pemerintah India telah mengklaim bahwa pekerja anak paksa ini telah tidak ada lagi (IndiaCelebratingTeam, 2017).

Permasalahan pekerja anak yang ada di India tidak serta merta ada begitu saja. Beberapa penyebab juga mendorong adanya kasus pekerja anak di India. Berikut beberapa penyebab yang memunculkan adanya pekerja anak di India (IndiaCelebratingTeam, 2017):

1. Kemiskinan yang melanda

Inti permasalahan munculnya pekerja anak di India yaitu karena kemiskinan yang mereka derita. Hampir sebagian besar penduduk negara ini mengalami kemiskinan. Sebab inilah yang menjadikan orang tua tidak mampu membiayai biaya pendidikan anak mereka sehingga anak-anak harus mencari upah dari hasil kerja mereka. Orang tua lah yang menjadi jembatan bagi pabrik, rumah, serta toko untuk mempekerjakan anak mereka di tempat tersebut. Anak-anak tersebut dipaksa bekerja guna meningkatkan finansial keluarga mereka sejak usia dini. Keputusan ini sebenarnya murni hanya untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka sendiri.

2. Kurangnya sumber daya pendidikan

Meskipun sudah merdeka sejak 1947, India tetap memiliki hak-hak yang seharusnya wajib diterima oleh anak-anak tetapi tidak dapat diperoleh mereka. Seperti contoh anak-anak dirampas hak fundamental mereka untuk pendidikan. Tercatat ada ribuan desa di India tidak mempunyai fasilitas pendidikan yang memadai apabila ada, letaknya bermil-mil jauhnya. Yang menerima penderitaan buruk ini yaitu keluarga miskin karena tidak mampu untuk memberikan hak tersebut kepada anak mereka ditambah, dengan kondisi pendidikan yang tidak memadai.

3. Keterbelakangan sosial dan ekonomi

Penyebab ini juga menjadi alasan utama pekerja anak yang ada di India. Orang tua yang memiliki terbelakang sosial juga tidak mampu memberikan anak-anak mereka nilai-nilai pendidikan. Akhirnya, anak-anak tersebut terjerumus ke pekerja anak. Permasalahannya karena orang tua yang tidak berpendidikan mengakibatkan buta huruf dan tidak tahu tentang dampak pekerja anak pada anak-anak mereka.

4. Penyakit atau cacat

Penyakit atau cacat yang dialami oleh orang tua menjadikan alasan bagi mereka agar anak-anak dapat memberikan nafkah bagi keluarga. Ini menjadikan alasan bagi anak-anak untuk mampu membiayai keluarga mereka.

5. Buruknya kepatuhan hukum

Sebenarnya larangan mengenai pekerja anak di pemerintah juga sudah diterapkan. Tetapi dengan tidak adanya kepatuhan hukum yang tepat, pekerja anak di

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

India terus berlanjut. Peraturan ini sebenarnya dapat ditegakan namun perlu adanya kepatuhan ketat pada hukum terkait.

6. Iming-iming akan tenaga kerja yang murah

Pemilik toko, perusahaan, serta pemilik pabrik lebih tertarik untuk merekrut anak-anak sebagai pegawai mereka karena upah yang diberikan sedikit. Upah yang diberikan kepada anak-anak hanya setengah dari upah yang biasa didapatkan oleh orang dewasa. Maka dari itu pihak-pihak yang merekrut pekerja lebih senang jika anak-anak menjadi pegawai mereka.

7. Tradisi keluarga

Penyebab selanjutnya bahwa pada masyarakat India mereka menyatakan pekerja anak itu sudah menjadi tradisi bagi banyak keluarga. Nilai budaya dan tradisional memainkan peran agar terus terjaganya pekerja anak di India. Banyak keluarga mempercayai bahwa kehidupan yang lebih baik bukanlah nasib mereka namun, tradisi kerja lama lah satu-satunya sumber penghasilan serta pencaharian mereka. Kepercayaan bahwa sejak kecil sudah menjadi pekerja akan membuat anak-anak lebih rajin dan lebih bijaksana dalam hal kehidupan di masa yang akan datang.

8. Diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan

Masyarakat India juga terbawa oleh keyakinan bahwa pihak perempuan lebih lemah dan tidak ada perbandingan dengan kaum laki-laki. Kebanyakan masyarakat yang kekurangan akan pendidikan yaitu dari pihak perempuan. Serta pernyataan bahwa kaum wanita itu lebih lemah dari kaum laki-laki sehingga, sering ditemukan perempuan kebanyakan bekerja bersama dengan orang tua mereka saja.

### B. Literature Review

Konsep Transnational Advocacy Network (TAN)

Transnational Advocacy Network adalah jaringan kegiatan advokasi yang melibatkan aktivis dari dua atau lebih negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau membangun jaringan dengan aktivis dari negara lain. Advokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pembelaan. Pembelaan disini berarti pembelaan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.

Konsep Transnational Advocacy Network (TAN) menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam bukunya, *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* adalah sebagai berikut:

“Transnational Advocacy Network (TAN) is defined as networks of activists, distinguishable largely by the centrality of principled ideas or values in motivating their formation. Besides, TAN is a World politics at the end of the twentieth century involves, alongside states, many non-state actors who interact with each other, with states, and with international organizations”.

TAN melakukan advokasi dalam isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan lingkungan hidup. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai advokasi penegakan HAM yang dilakukan oleh Anti-Slavery atas kegagalan sistematis pada kebijakan pemerintah India dalam pekerja anak.

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

Strategi TAN dalam memobilisasi masyarakat dan menekan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Information Politics, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta membeberkan fakta melalui pernyataan-pernyataan dari para korban dan sebagainya hingga menarik perhatian masyarakat yang kemudian mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. (Keck & Sikkink, 1999)
- b. Symbolic Politics, yaitu upaya yang dilakukan dengan symbolic yaitu mengadakan peringatan-peringatan aksi/kejadian, atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga masyarakat memperhatikan isu tersebut. (Keck & Sikkink, 1999) (Keck & Sikkink, 1999)
- c. Leverage Politics, upaya yang dilakukan untuk mengungkit/mengaitkan isu yang diperjuangkan tersebut sehingga mendapatkan perhatian dan dukungan dari actor yang memiliki kekuatan dan dapat memberikan pengaruh secara internasional terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Pengaruh yang dimaksud berupa pengaruh material (material leverage) merujuk pada kemampuan jaringan untuk mempengaruhi actor target melalui hal-hal material seperti bantuan ekonomi, militer, serta hubungan diplomatic, maupun pengaruh moral (moral leverage). Pengaruh ini kemudian dapat dijadikan landasan bagi jaringan untuk melibatkan actor yang lebih kuat agar dapat memberi pengaruh pada isu yang diperjuangkan (Keck & Sikkink, 1999)
- d. Accountability Politics, upaya yang dilakukan untuk selalu mengingatkan pemerintah dan actor lainnya agar mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Ketika actor yang ditargetkan telah berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati, jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang antara janji actor dan praktiknya. Strategi ini dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan pada komitmen actor target (Keck & Sikkink, 1999)

Aktor utama dalam jaringan advokasi adalah:

1. Non-Governmental Organization (NGO) ataupun International Non Governmental Organization (INGO);
2. Gerakan Sosial;
3. Yayasan;
4. Media;
5. Gereja, Serikat Buruh;
6. Organisasi Regional dan Internasional;
7. Pemerintah

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, kasus yang terjadi di India ini tidak akan bisa terselesaikan jika hanya negara atau pemerintah saja yang menangani kasus ini mengingat besarnya angka pekerja anak di India dan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan kasus ini masuk dalam isu kejahatan internasional dengan mengambil hak asasi manusia dengan mengeksploitasi mereka, memperdagangkan mereka. Oleh sebab itu muncul lah actor-aktor diluar negara seperti Non Governmental Organization (NGO) dan salah satu NGO yang menangani kasus ini di India yaitu Anti-Slavery, yang menangani kasus ini dengan

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

penanganan advokasi dan campaign di berbagai kasus yang berkaitan dengan perbudakan. Upaya-upaya yang telah disebutkan diatas juga diterapkan oleh Anti-Slavery untuk mencapai tujuannya. Adapun Anti-Slavery menggunakan empat strategi yang ada dalam upaya Anti-Slavery melakukan pengembangan jaringan.

### **C. Penyebaran Informasi Eksploitasi Pekerja Anak Melalui Laporan Kasus Brick Kiln Di Website Anti-Slavery**

pekerja anak di India telah menjadi permasalahan besar dari tahun ke tahun, anak-anak di India yang berumur sekitar 5 hingga 14 tahun terpaksa harus bekerja 12 jam sehari dan meninggalkan sekolah mereka karena permasalahan ekonomi keluarga mereka yang sudah dipaparkan di BAB II, anak-anak ini terpaksa untuk membantu ekonomi keluarga dan menghidupi diri sendiri, karena tak jarang dari para pekerja anak ini yang orang tuanya terlilit hutang sehingga mereka harus mencari uang untuk biaya keluarga. Tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini hampir terjadi di seluruh daerah miskin di India. Bahkan tak jarang sebagian besari dari para pekerja anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak sama sekali. Sebagian besar anak-anak ini bekerja dalam beberapa sector yaitu sector pertanian, sector industry, dan sector pelayanan.

Anti-Slavery sebagai organisasi Hak Asasi Manusia yang tertua di dunia sejatinya harus memiliki peran dan andil yang besar dalam penanganan kasus pekerja anak di India. Anti-Slavery dan mitra-mitra lokalnya memiliki beberapa program yang memang tujuannya untuk menangani masalah eksploitasi pekerja anak di India dan ketika eksploitasi anak sudah dalam kasus yang parah, hal ini dinamakan perbudakan anak.

Dalam penelitian ini, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya dalam BAB I sub bab Landasan Teori, penelitian ini menggunakan Konsep Transnational Advocacy Network (TAN). Menurut Margaret dan Kathryn Sikkink dalam bukunya yang berjudul *Transnational Advocacy Networks In International And Regional Politics* dijelaskan bahwa terdapat 4 upaya suatu Jaringan Advokasi untuk melakukan advokasi yaitu Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politic dan Accountability Politics. Dalam sub bab ini akan penulis jabarkan tiga dari 4 upaya dari Anti-Slavery dalam mencapai tujuannya. Tiga dari upaya tersebut adalah yaitu Information Politics, Leverage Politic dan Accountability Politics.

Sesuai dengan pengertian dari Margaret dan Kathryn, Information Politics yaitu upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta membeberkan fakta melalui pernyataan-pernyataan dari para korban dan sebagainya hingga menarik perhatian masyarakat yang kemudian mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. (Keck & Sikkink, 1999)

Anti-Slavery seperti yang diketahui dan sudah diakui merupakan suatu NGO yang sudah berdiri puluhan tahun dan sudah memiliki jaringan di seluruh dunia. Anti-Slavery memiliki misi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan yang ada di dunia. Anti-Slavery memilih untuk menangani akar penyebab kebudakan dan konsekuensi dari

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

perbudakan tersebut untuk nantinya bisa mencapai perubahan yang berkelanjutan. Anti-Slavery mengadakan project untuk membantu anak-anak yang terjerat dalam kasus perbudakan di 10 negara. Salah satunya adalah di negara India. Di India, dimana seluruh keluarga terjebak dalam jeratan hutang oleh pemilik tempat pembakaran batu bata, dimana pemilik ini menolak untuk membayar mereka. Anti-Slavery membantu para pekerja ini dapat mengklaim gaji mereka, meninggalkan tempat pembakaran batu bata, dan memastikan anak-anak yang terjerat dalam kasus ini untuk dapat pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Pada bulan Agustus tahun 2012, Anti-Slavery mengadakan project untuk pemberdayaan untuk Para Pekerja Terikat di Industri Tempat Pembuatan Batu Bata di tiga negara bagian di India, yaitu di Punjab, Haryana, dan Chandigar. Project ini mendukung para Pekerja Terikat ini untuk mendapatkan hak mereka yaitu mendapatkan dukungan dari negara. Proyek ini bekerja sama dengan Pemilik tempat pembuatan batu bata dan pihak yang berwenang untuk membuat pabrik ini diawasi oleh Undang-Undang Pabrik inia bernama Factory Act India dimana undang-undang ini yang menentukan upah minimum yang harus didapatkan oleh para pekerja dan undang-undang ini juga melarang pekerja anak. Anti-Slavery juga membantu para pekerja ini untuk membuat asosiasi/kumpulan bagi para pekerja yang bekerja di tempat pembakaran batu bata. (Anti-Slavery, 2012)

Ada banyak sekali tempat pembakaran batu bata di seluruh bagian di negara India. Punjab memiliki sekitar 3000 tempat pembakaran batu bata walaupun Punjab adalah negara bagian yang kecil. Industri tempat pembakaran batu bata di India dan di negara lain sama saja, Industri ini memperkerjakan sekitar 200 pekerja. Anti-Slavery bermaksud untuk memberi manfaat lebih banyak kepada para pekerjanya.

Pada tahun 2013, Ini adalah tahun pertama bagi Anti-Slavery dalam menjalankan proyeknya di Tempat Pembakaran Batu Bata di India dalam membebaskan para pekerja ini dari jeratan hutang. Para Pekerja ini mencakup di 50 tempat pembuatan batu bata dan dibagi menjadi tiga distrik di Punjab. Anti-Slavery melakukan survey kebutuhan para pekerja ini untuk mendapatkan haknya dari pemerintah seperti pendidikan untuk anak-anak. Anti-Slavery membentuk sebuah asosiasi pekerja dan keanggotaan dari asosiasi ini telah berkembang pesat. Para mitra local dari Anti-Slavery memulai diskusi dengan Asosiasi Pemilik Tempat Pembakaran batu bata untuk meningkatkan kondisi pekerjaan di tempat itu. 15 dari pemilik tempat pembakaran batu bata berkomitmen untuk memasang keran air minum yang aman dan memulai provident fund scheme untuk para pekerjanya. Pada bulan Mei 2013, Mitra Anti-Slavery yang berada di Delhi dan Punjab mengadakan pelatihan pekerja bagi pria dan wanita tentang ketentuan hak pemerintah, kondisi tempat kerja di kiln dan dukungan hukum yang harus didapatkan para pekerja ketika mereka berada dalam bentuk perbudakan yang ekstrim. Proyek ini juga mengadakan hotline gratis bagi para pekerja untuk dapat menghubungi pihak berwajib untuk melaporkan pelanggaran dan mencari dukungan sementara. Dan sebuah pusat rehabilitasi sementara telah didirikan di Punjab untuk para pekerja yang melarikan diri dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi mereka. (Anti-Slavery, 2013)

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada tahun yang sama juga, mitra local Anti-Slavery mengadakan pertemuan dengan para pekerja yang bekerja di tempat pembakaran batu bata, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran para pekerja tentang masalah-masalah seperti pekerja terikat, dan hak hak hukum mereka. Tujuan dari pertemuan ini juga untuk membina para pekerja untuk membuat organisasi para buruh atau serikat para buruh sehingga mereka dapat dengan mudah untuk beraspirasi ketika mereka dalam masalah.

Pertemuan ini diadakan di dalam Kuil Ram Tirath di dekat daerah Amritsar. Pada saat itu, para pekerja yang hadir ada sekitar 1500 orang, melebihi dari ekspektasi sebelumnya. Para pekerja ini berasal dari distrik Amritsar, Taran Tarnm dan Ferozpour. Sebelumnya, Anti-Slavery dan mitra lokalnya VSJ hanya mengharapkan pekerja yang hadir hanya 500 hingga 1000. Pidato dibuat oleh berbagai staf dan sukarelawan VSJ, pidato ini berisi pernyataan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja, namun juga memberi solusi bagaimana caranya agar masalah-masalah nya bisa diatasi. Inti dari pertemuan tersebut adalah agar para pekerja dapat bisa berkumpul bersama-sama saling bahu-membahu mengenai masalah yang mereka hadapi sehingga mereka bisa saling menguatkan dan mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan diakhir pertemuan, Hira Singh salah satu dari staf VSJ menyanyikan beberapa lagu mengenai kehidupan tentang pekerja terikat yang bekerja di tempat pembakaran batu bata. Informasi-informasi yang disampaikan di pidato berasal dari perwakilan dari para pekerja di tempat pembakaran batu bata dari berbagai distrik, dan para perwakilan ini diminta sekalian untuk menjadi ketua perwakilan dari distrik mereka. Dengan demikian, lima puluh dari pekerja dari tempat pembakaran batu bata di ketiga distrik ini kini telah diminta untuk memimpin dan mewakili aspirasi para pekerja di tingkat local. Meskipun ini adalah langkah kecil dalam proses panjang untuk menciptakan persatuan dari para pekerja ini, hal ini menggembirakan bagi Anti-Slavery dan mitra lokalnya, VSJ melihat begitu banyak antusiasme dari para pekerja tentang ide tersebut. (Justice, 2013) meskipun setelah acara ini berakhir, dan para pekerja tempat pembuatan batu bata kembali ke tempat mereka, beberapa pekerja menghadapi penganiayaan dari para majikan mereka. Para pengusaha pemilik tempat pembuatan batu bata ini khawatir tentang implikasi dari para pekerja yang sudah menyadari hak-hak mereka. Namun VSJ tetap memantau situasi dan memberikan dukungan.

Pada tahun 2014, Anti-Slavery melanjutkan proyeknya untuk memberdayakan para pekerja terikat. Setelah bekerja di 50 tempat pembakaran batu bata di India, Anti-Slavery mengekspansi pekerjaannya menjadi 100 tempat pembakaran batu bata. Keanggotaan asosiasi pekerja telah meningkat pesat. Anggota dididik melalui materi peningkatan kesadaran yang ditargetkan seperti kartu pos yang memberikan informasi penting tentang hak-hak pekerja dan dukungan yang tersedia di dekat tempat kerja mereka. (Anti-Slavery, 2014)

Sebagai hasil dari pekerjaan penjangkauan ini dan panggilan ke hotline gratis yang dibuat oleh proyek dari Anti-Slavery, 1.005 petisi diajukan atas nama 4.600 orang ke Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) yang meminta tindakan yang tepat terhadap penyelidikan atas pelanggaran terhadap para pekerja, dan meminta untuk pembebasan mereka dari perbudakan. Keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

perbudakan yang parah telah didukung untuk membawa kasus mereka ke Hakim Daerah. Anti-Slavery juga menjangkau para pemilik kiln untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kondisi di tempat pembakaran batu bata itu, dan para pemilik kiln yang berkomitmen terus bertambah. Mitra Anti-Slavery juga bekerja dengan pejabat dan pemerintah setempat dalam penerapan undang-undang dan kebijakan untuk meningkatkan kondisi kerja di tempat pembakaran batu bata ini.

Hasilnya, para pekerja diundang untuk mendaftar untuk kartu jatah hak negara, yang mendukung keluarga untuk membeli makanan dan pasokan dasar, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan mereka pada pinjaman yang diambil dari majikan mereka. Demikian pula, anak-anak pekerja dibebaskan dari biaya sekolah dan mendapatkan akses ke sekolah.

Anti-Slavery juga memperluas proyeknya selama musim libur ke daerah sumber dari mana para pekerja migran berangkat untuk bekerja di kiln untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, mendukung mereka untuk mengakses hak-hak negara dan memfasilitasi migrasi yang aman.

Pada tahun 2014 hingga 2015, Anti-Slavery dengan mitra lokalnya di India, Volunteers for Social Justice (VSJ) untuk daerah Punjab. Centre for Education and Communication (CEC) di daerah Delhi dan Jan Jagriti Kendra (JIK) di Chhattisgarh bekerja untuk meningkatkan kondisi kerja di Kiln dengan melibatkan para pemilik dan pemberdayaan pekerja untuk memfasilitasi akses hak pekerja ke pemerintah, serta dengan melobi pemerintah daerah dan nasional untuk melindungi pekerja migran dari tenaga kerja terikat. Peningkatan kesadaran dan dukungan berlanjut di Kiln dan tahun 2014, lebih dari 45.000 pekerja telah menghadiri lebih dari 900 sesi yang diselenggarakan VSJ mengenai hak-hak pekerja dan akses ke hak-hak pemerintah, dengan VSJ membantu lebih dari 5.000 pekerja untuk mendaftar. (Anti-Slavery, 2014)

Pada tahun 2015, Anti-Slavery dan para mitra lokalnya menyerukan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah India untuk mengatasi Pekerja yang terikat baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang bekerja di tempat pembakaran batu bata dan memastikan pemerintah untuk memenuhi konvensi ILO no.29 mengenai Forced Labour dan konvensi ILO lainnya.

Sektor tempat pembuatan batu bata ini sangat rentan terhadap kerja paksa dan kerja yang terikat. Upah yang sangat rendah, eksploitasi yang meluas, penggunaan uang muka dan uang pinjaman dalam jumlah besar untuk mengendalikan para pekerja, serta masyarakat yang dikucilkan secara sosial dan secara ekonomi terpinggirkan bisa terjadi di tempat ini. Hal ini berasal dari kegagalan pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang relevan dan menuntut para pelanggar hukum dan kurangnya tindakan berkelanjutan yang menargetkan akar penyebab dari masalah pekerja terikat dan lingkungan dimana para pekerja mengalami ancaman dan kekerasan ketika berusaha untuk berorganisasi dan bertindak secara kolektif. Diambil dari catatan pekerjaan para mitra Anti-Slavery yang bertugas di daerah Punjab dan Chattisgarh, Anti-Slavery telah menyiapkan makalah pengarahan yang tantangan yang terus dihadapi oleh para pekerja kiln bata dan rekomendasi untuk mengatasi hal ini dan memastikan hak-hak pekerja sesuai dengan hukum internasional dan nasional. (Willingham, 2015)

## JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada tahun 2016, bersama dengan mitra lokalnya, Anti-Slavery membantu para pekerja di Kiln mengakses keadilan, mendapatkan kompensasi, memperbaiki kondisi kerja dan mendukung mereka untuk berkumpul sebagai kelompok untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Anti-Slavery juga bekerja untuk memastikan anak-anak dapat pergi ke sekolah dan memiliki akses perawatan kesehatan. Anti-Slavery juga memfokuskan penelitian mereka kepada perempuan yang juga menjadi pekerja. Anti-Slavery lalu menyelenggarakan konvensi nasional pertama untuk pekerja perempuan di bulan April 2016. Highlight dari tahun ini adalah Anti-Slavery dapat memperoleh pembebasan dari sertifikat perbudakan bagi pekerja dalam jumlah besar, meskipun negara bagian Punjab masih belum mengakui bahwa pekerja terikat ada di negara bagian itu. (Anti-Slavery, 2016)

Upaya-Upaya yang Anti-Slavery lakukan dalam memberantas eksploitasi Pekerja Anak di India tidak hanya terjun langsung ke tempat kejadian perkara, namun Anti-Slavery melakukan sejumlah kampanye internasional yang mengangkat isu Child Slavery. Kasus Eksploitasi pekerja anak ini adalah termasuk bagian dari perbudakan anak, karena di dalam kasus eksploitasi pekerja anak, anak-anak dari umur 5 hingga 14 tahun dipaksa bekerja dan terpaksa tidak sekolah. Anak-anak ini bekerja untuk membantu melunasi hutang keluarganya.

### **D. Upaya Anti-Slavery Untuk Mendapatkan Perhatian Dari Para Actor Yang Memiliki Kekuatan**

Pada tahun 2014, Direktur dari Anti-Slavery, Aidan Mcquade menghadiri konferensi perburuan internasional yang ke 103 di Geneva. Dalam pidatonya, Aidan mengatakan kepada para delegasi yang hadir untuk mendesak para pemerintah untuk membuat peraturan yang pasti untuk menangani kasus kerja paksa di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan Anti-Slavery untuk mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk lebih memperhatikan lagi isu kerja paksa dan perbudakan ini.

Aidan MCQuade mengatakan dalam pidatonya

“We therefore appeal to this Conference to seek a binding Protocol with a strong Recommendation to the Convention that will require states to ensure law and practice that effectively identifies and protects victims of forced labour, giving special consideration to the particular risks faced by migrants, women and children and to ensure that the perpetrators of forced labour compensate their victims; that require states ensure their courts and law enforcement have sufficient capacity to ensure effective rule of law against forced labour so that states create a level playing field for ethical business, declaring also their expectations of business action to eradicate forced labour from their supply chains and how businesses should disclose their efforts towards these ends; that requires states and employers to promote freedom of association and collective bargaining for all workers; and that encourages states to incorporate into their aid, trade and diplomacy measures to reduce the risk of forced labour.” (Anti-Slavery, 2014)

## **JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada tahun 2015, Anti-Slavery mengatakan di situs resminya bawah Anti-Slavery mengajak para mitra internasionalnya untuk menyerukan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah India untuk mengatasi permasalahan pekerja terikat baik itu adalah pekerja dewasa dan anak-anak di sector tempat pembuatan batu bata dan memastikan bahwa Pemerintah India mengimpelentasikan konvensi ILO no.29 mengenai Forced Labour dan konvensi ILO yang lainnya.

Para pekerja di tempat pembuatan batu bata ini sangat rentan dengan isu kerja paksa dan menjadi pekerja terikat. Penggunaan uang muka dan pinjaman dalam jumlah besar untuk mengamankan dan mengendalikan para pekerja agar tetap dalam siklus hutang yang berkepanjangan. Para pekerja migran juga dikucilkan secara social dan secara ekonomi terpinggirkan. Praktik perekrutan yang eksploitatif, bahkan pemberian upah yang sangat rendah semua bisa terjadi di tempat ini.

Menurut Anti-Slavery, hal ini terjadi karena kegagalan oleh Pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang relevan untuk menuntut para pelanggar hukum dan kurangnya tindakan berkelanjutan untuk mengatasi akar dari permasalahan ini. Dimana para pekerja mengalami ancaman dan kekerasan ketika merek berusaha untuk berorganisasi dan bertindak secara kolektif.

Anti-Slavery menyiapkan makalah pengarahan yang isinya uraian mengenai tantangan yang terus dihadapi oleh para pekerja di tempat pembakaran batu bata dan rekomendasi untuk mengatasi hal ini dan memastikan hak-hak para pekerja dipenuhi oleh pemerintah India sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Pada tanggal 13 Juni 2017, Pemerintah India menyerahkan instrument kepada International Labour Organization untuk meratifikasi 2 konvensi fundamental dari ILO mengenai pekerja anak. Yang pertama adalah Minimum Age Convention (no.138) dan The Worst Forms of Child Labour Convention (no.182).

India adalah negara anggota ILO ke 170 yang meratifikasi konvensi no.138 yang mengharuskan negara untuk menetapkan usia minimum dimana tidak seorang pun anak di bawah umur yang boleh diterima bekerja atau bekerja dalam pekerjaan apapun kecuali untuk pekerjaan ringan dan pertunjukkan artistik.

Selain itu, India adalah negara anggota ILO ke 181 yang meratifikasi konvensi no.182 yang menyerukan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan anak-anak seperti penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata, penggunaan anak-anak untuk pelacuran, untuk pornografi, dan dalam kegiatan-kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba dan pekerjaan-pekerjaan berbahaya lainnya.